

## **PENDIDIKAN PLURALISME AGAMA (MEMBANGUN HUBUNGAN SOSIAL LINTAS AGAMA DI SEKOLAH)**

Oleh: Sapendi

Penulis adalah Dosen STAIN Pontianak

### **ABSTRACT**

Lately, religion has become something scary and worrying. Religion in the hands of its followers often appears with a violent face and seems to have lost its friendliness. In recent years, there have been a lot of conflicts, intolerance and violence in the name of religion and belief in various regions in Indonesia. In the context, it becomes reasonable when certain people call religion the source of the problem in the world. The religious views that tend to be anachronistic potentially leads to conflict. In fact, to say that religion is a source of problem is clearly not wise and unhistorical, due to the fact for centuries, religion has given contribution to millions of people. In the context of eliminating the destructive aspects of religion and presenting constructive side of it as a unifying factor, schools as an institution mandated to educate the nation should take part in providing an understanding of religion and should be capable of creating an environment that provides educational opportunities to students to construct harmonious social relations between students of different religion.

Kata-kata kunci: pluralisme agama, konflik, intoleransi, harmonis

#### **A. Pendahuluan**

Di Indonesia, aksi kekerasan atas nama agama semakin meningkat beberapa tahun belakangan ini. Peristiwa perusakan rumah ibadah di beberapa daerah adalah merupakan gambaran dari semakin terpuruknya hubungan sosial lintas agama di Indonesia. Realitas ini merupakan bagian dari keberlanjutan konflik yang disebabkan oleh pola hubungan sosial lintas agama yang eksklusif. Berkembangnya paham pluralisme agama dan multifaith education kemungkinan besar berasal dari kesalahan paradigma orang dalam mempelajari agama. Mereka mempelajari agama dengan mempelajari kenyataan umat agama yang dinilai sebagai representasi dari agama itu sendiri.

Belakangan ini, agama adalah sebuah nama yang terkesan membuat gentar, menakutkan dan mencemaskan. Agama ditangan para pemeluknya belakangan ini sering tampil dengan wajah kekerasan dan seolah-olah telah kehilangan wajah ramahnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak muncul konflik, intoleransi dan kekerasan atas nama agama dan berkeyakinan diberbagai kawasan di Indonesia. Dalam konteks semacam ini menjadi sangat beralasan apabila da pihak yang menyebut agama

adalah sumber masalah dari seluruh kekacauan di dunia. Padangan dunia keagamaan yang cenderung anakronistik memang sangat berpotensi untuk memecah belah dan saling klaim kebenaran dipastikan akan berujung konflik. Memang, menyatakan agama semata-mata sebagai sumber masalah jelas tidak arif dan a-historis, karena faktanya selama berabad-abad agama telah menopang dan member sumbangsi bagi jutaan orang.

Paradoks agama pun tidak bisa dielakkan. Di satu sisi, agama adalah pembawa damai, tetapi di sisi lain, agama telah ikut mendorong konflik, bahkan kadangkala tindakan kekerasan. An Wilson dalam buku *Against Religion. Why We Should Try to Live Without It* (1990), melukiskan paradox dan dilema dalam konflik antar-agama tersebut, seperti seseorang ada dalam sebuah agama, konflik dengan agama lain akan dianggap sebagai “sebuah tindakan kebenaran melawan kezhaliman”, sedangkan jika orang itu ada di agama lain yang dilawan itu, maka ia akan menganggap sebaliknya, agamanya sendiri sebagai yang benar, melawan agama lawannya itu sebagai yang salah, yang zhalim. Tetapi jika seseorang berada di luar dua agama yang sedang konflik itu, ia akan melihat keduanya ada dalam kesalahan, dan ia akan menganggap bahwa konflik yang sama-sama menggunakan klaim kebenaran itu sebagai kenaifan karena jelas keduanya salah.

Kalimantan Barat (Kalbar) merupakan salah satu propinsi yang memiliki catatan sejarah “buruk” tentang konflik yang melibatkan beberapa kelompok etnis, baik penduduk asli maupun pendatang. Sejauh ini catatan konflik yang terjadi di Kalbar lebih merupakan konflik sosial berbasis etnis, namun bukan berarti bahwa, faktor-faktor agama tidak berperan sama sekali. Isu-isu keagamaan merupakan salah satu persoalan yang juga sensitif bagi masyarakat Kalbar, karena harus diakui bahwa, ada beberapa “letupan-letupan” – meskipun masih dalam skala kecil – yang terjadi karena persoalan agama.

Berbagai friksi terjadi di daerah-daerah pedalaman, terkait dengan proses penyebaran agama kepada orang-orang yang telah beragama, atau berkenaan dengan kebebasan mengekspresikan kehidupan beragama. Hal-hal seperti ini seringkali menimbulkan persoalan antar ummat beragama di Kalbar. Terlebih lagi dalam momentum-momentum politik lokal, seperti pemilihan Bupati, Walikota maupun Gubernur, eskalasi isu-isu keagamaan relatif cukup kuat.

Sebagai salah satu pranata sosial, peran agama lebih menyerupai sebuah instrumen positif, dimana ia dapat berperan secara konstruktif dan sekaligus destruktif. Atau istilah yang lazim penulis kemukakan untuk kedua sisi mata uang peran agama ini yaitu sebagai faktor pemecah (*dividing factor*) dan faktor perekat atau pemersatu (*uniting factor*). Agama dapat berperan sebagai pemecah belah persatuan manakala agama diperalat untuk satu keperluan politik pragmatis tertentu. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa, agama itu tidak hanya terkait dengan aspek kognisi sang penganut, akan tetapi juga mencakup aspek rasa, emosi dan internalisasi yang sangat subjektif. Seseorang bisa bersikap tidak rasional, manakala sudah berkenaan dengan emosi dan internalisasi keagamaan. Terlebih lagi jika ia secara kaku atau rigid memahami ajaran agamanya, maka seolah-olah apa yang dilakukannya adalah murni atas nama Tuhan dan dalam restu Tuhannya. Meskipun sesungguhnya sikap dan tindakan tersebut sangat tidak rasional, cenderung merusak diri dan orang lain serta tidak jarang malah bergerak menjauh dari substansi nilai-nilai ajaran agama yang sesungguhnya.

Kemudian agama juga bisa menjadi faktor perekat atau pemersatu, tapi bukan penyatuan. Konsep pemersatu atau perekat bukanlah penyeragaman, karena jika yang dimaksud adalah penyeragaman ini yang menjadi salah satu akar penyebab konflik. Konsep agama sebagai pemersatu lebih kepada semangat inklusifitas, toleransi, egalitarian, humanisasi yang diderivasi dari ajaran keagamaan. Oleh karenanya memang, agama yang harus dikedepankan bukan aspek ideologis dan normatif dari agama --yang cenderung melihat persoalan secara hitam putih-- akan tetapi konsep dan pemahaman agama yang lebih apresiatif terhadap keragaman (pluralitas), terbuka dan dialektis (inklusif), lebih berorientasi kepada persoalan yang riil di tengah masyarakat bukan mengurus hal-hal yang bersifat menara gading (*ivory tower*) dan semata persoalan akhirat (eskatologis). Hemat penulis, dengan tampilan agama yang sedemikian, maka peluang untuk membangun kesaling pengertian antar penganut agama akan dapat tercapai.

Dalam konteks mengeliminasi aspek destruktif agama dan menghadirkan sisi konstruktif agama sebagai faktor perekat dan pemersatu, maka sekolah sebagai lembaga yang diamanahkan untuk mencerdaskan bangsa harus mengambil bagian dalam memberikan pemahaman tentang agama dan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang memberikan peluang pada siswa untuk membangun hubungan sosial yang harmonis antar siswa lintas agama.

Untuk itu, diperlukan adanya upaya-upaya untuk mengubah paradigma pendidikan yang eksklusif menuju paradigma pendidikan agama yang toleran dan inklusif. Model pengajaran agama yang hanya menekankan kebenaran agamanya sendiri mau tidak mau harus 'dibongkar ulang'. Sebab cara pemahaman teologi yang eksklusif dan intoleran pada gilirannya akan dapat merusak harmonisasi agama-agama dan menghilangkan sikap untuk saling menghargai kebenaran dari agama lain.

## **B. Pengertian Pluralisme Agama**

Secara etimologi, pluralisme agama, berasal dari dua kata, yaitu "pluralisme" dan "agama". Dalam bahasa Arab diterjemahkan "*al-ta'addudiyah al-diniyyah*", dan dalam bahasa Inggris "*religious pluralism*". Oleh karena istilah pluralisme agama berasal dari bahasa Inggris, maka untuk mendefinisikannya secara akurat harus merujuk kepada kamus bahasa tersebut. Pluralism berarti "jama" atau lebih dari satu. Pluralism dalam bahasa Inggris mempunyai tiga pengertian. *Pertama*, pengertian kegerejaan: (i) sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan, (ii) memegang dua jabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat kegerejaan maupun non kegerejaan. *Kedua*, pengertian filosofis; berarti system pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasarkan lebih dari satu. Sedangkan *ketiga*, pengertian sosio-politis: adalah suatu sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut.

Kata "plural" bermakna jamak dan beragam. Pluralisme merupakan suatu kondisi dimana segala ragam corak dan warna terhimpun dengan segala perbedaan yang ada. Kondisi perbedaan yang ada ini bukan ingin dilebur menjadi satu ragam baru

melainkan justru dibiarkan untuk memperkaya dinamika ragam yang ada. Dalam kehidupan beragama, pluralisme merupakan keyakinan bahwa kebenaran terdapat dalam berbagai agama. Tidak ada kebenaran tunggal. Para penganut paham ini mengakui dan menghargai perbedaan yang ada dan bersama-sama berupaya menjalin kerjasama. Sebagaimana pernah disyaratkan oleh Alwi Shihab bahwa dalam pluralisme sikap yang penting untuk diterapkan adalah tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan namun juga keterlibatan aktif dalam kemajemukan tersebut. Keterlibatan tersebut ditunjukkan melalui sikap interaktif secara positif dalam lingkungan yang majemuk, tidak melakukan klaim kepemilikan tunggal (monopoli) atas suatu kebenaran, dan sikap yang terbuka terhadap perbedaan-perbedaan yang ada (Shihab, 1997: 41-42).

Dalam kehidupan politik, pluralisme berarti adanya perguliran/ruling dalam kekuasaan. Penyebaran kekuasaan juga berarti adanya otoritas secara luas yang terbagi dalam struktur-struktur kekuasaan diantara pejabat pemerintah, individu, dan kelompok-kelompok. Pluralisme juga menjadi fondasi yang kokoh bagi terciptanya demokrasi. Karakteristik pluralisme dalam demokrasi disyaratkan dengan kesempatan untuk berfikir secara bebas, adanya penghargaan terhadap kelompok-kelompok minoritas, adanya konflik dan konsensus yang dapat diatur secara damai dan menghindari kekerasan, adanya partisipasi politik, serta adanya tingkat kepercayaan dan kepatuhan yang tinggi pada konstitusi dan kebijakan-kebijakan yang demokratis.

Sebagai bangsa yang memiliki keragaman etnis, agama, dan budaya yang luar biasa, Indonesia seringkali dijadikan ajang pemantauan bagaimana proses-proses demokrasi dapat dilangsungkan. Persentuhan ragam budaya dan agama antar kelompok masyarakatnya yang telah berlangsung sejak lama ini juga telah melahirkan ragam konflik dan konsensus yang terjadi. Demokrasi yang oleh Robert Dahl juga disyaratkan dengan terciptanya karakteristik pluralisme yang kondusif bagi sebuah negara ini mendapatkan gymnasium-nya di Indonesia.

Adapun tentang agama para ahli sosiologi dan antropologi cenderung mendefinisikan agama dari sudut fungsi sosialnya-yaitu suatu system kehidupan yang mengikat manusia dalam satuan-satuan atau kelompok-kelompok sosial. Sedangkan kebanyakan pakar teologi, fenomenologi dan sejarah agama melihat agama dari aspek substansinya yang sangat asasi-yaitu sesuatu yang sakral (Riyal, 2005: 12).

Dari definisi diatas, maka dapat di tarik suatu pengertian bahwa "pluralitas agama" adalah kondisi hidup bersama (koeksistensi) antar agama (dalam arti yang luas) yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama.. Namun dari segi konteks dimana "plurlisme agama" sering digunakan dalam studi-studi dan wacana sosio-ilmiah pada era modern ini, memiliki definisi yang berbeda. John Hick, yang dikutip Anis Malik Thoha (2005: 15) misalnya menyatakan : "*...pluralisme agama adalah suatu gagasan bahwa agama-agama besar dunia merupakan persepsi dan konsepsi yang berbeda tentang, dan secara bertepatan merupakan respon real atau Yang Maha Agung dari dalam pranata cultural manusia yang bervariasi; dan bahwa transpormasi wujud manusia dari pemusatan-diri menuju pemusatan hakiki terjadi secara nyata dalam setiap masing-masing pranata cultural manusia tersebut dan terjadi, sejauh yang dapat diamati, sampai pada batas yang sama*". Dengan kata lain, Hick menurut Anis

menegaskan sejatinya semua agama adalah merupakan manifestasi-manifestasi dari realitas yang satu. Dengan demikian, semua agama sama dan tak ada yang lebih baik dari yang lain.

Lebih lanjut Nurchalish Madjid yang dikutip Adian Husaini, dalam majalah Media Dakwah Edisi No. 358 tahun 2005 pluralisme agama adalah istilah khas dalam teologi. Dia juga menyatakan bahwa ada tiga sikap dialog agama yang dapat diambil, yaitu *pertama*, sikap eksklusif dalam melihat agama lain (agama-agama yang lain adalah jalan yang salah, yang menyesatkan bagi pengikutnya; *kedua*, sikap inklusif (Agama-agama lain adalah bentuk implisit agama kita); *ketiga* sikap pluralis yang biasa terekspresi dalam macam-macam rumusan, misalnya " Agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai kebenaran yang sama", "Agama-agama lain berbicara secara berbeda, tetapi merupakan kebenaran-kebenaran yang sama sah". Atau "setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran".

Komarudin Hidayat dalam Andito yang dikutip Atang Abdul Hakim dan Jaih Mobarak (2000: 6-7), mengatakan bahwa pluralisme agama merupakan salah satu dari tipe sikap keberagamaan yang secara teologis pluralitas agama dipandang sebagai suatu realitas, masing-masing berdiri sejajar sehingga semangat missionaris atau dakwah dianggap tidak relevan.

### C. Sejarah Pluralisme Agama

Untuk memahami pluralisme agama, perlu ditelusuri sejarahnya, paling kurang sejak awal abad ke-20 . Ketika itu seorang teolog Kristen Jerman bernama Ernst Troeltsch mengungkapkan perlunya bersikap pluralis ditengah berkembangnya konflik internal agama Kristen maupun antar agama. Dalam artikelnya berjudul " *The Place of Christianity among the World Religions*", ia menyatakan, umat Kristiani tidak berhak mengklaim paling benar sendiri. Pendapat senada banyak dilontarkan sejumlah pemikir dan teolog Kristen antara lain, seperti William E. Hocking dan sejarawan terkenal Arnold Toynbee. Oleh karena itu gerakan ini dapat dikatakan sebagai "liberalisasi agama Kristen" yang telah dirintis dan diasaskan oleh tokoh Protestan liberal Friedrich Schleiermacher pada sekitar abad pertengahan ke-19 lewat pergerakannya yang dikenal dengan "*Liberal Protestantism*". Konflik internal Kristen yang hebat ketika itu sampai mendorong Presiden AS, Grover Cleveland, turun tangan untuk mengakhiri perang antar aliran tersebut. Pada awal-awal abad ke-20 juga mulai bermunculan bermacam-macam aliran fundamentalis Kristen di Amerika Serikat. Jadi selain konflik antar aliran Kristen, ternyata faktor politik juga sangat erat dengan latar belakang gagasan ini.

Sebagai sebuah bentuk liberalisasi agama, Pluralisme Agama adalah respon teologis terhadap *political pluralism* (baca: liberalisasi politik) yang telah cukup lama digulirkan (sebagai wacana) oleh para peletak dasar-dasar demokrasi pada awal dan yang secara nyata dipraktikan oleh Amerika Serikat. Kecendrungan umum dunia Barat pada waktu itu telah berusaha menuju modernisasi di segala bidang. Dan salah satu ciri dari modern adalah demokrasi, globalisasi dan HAM. Maka, dari sinilah lahir *political pluralism*. Jika dilihat dari konteks itu, maka *Religious Pluralism* pada hakikatnya adalah gerakan politik par excellen dan bukan gerakan agama. Setiap manusia

dipandang sama " *by virtue of being human*", tidak ada ras, suku, angsa atau agama yang berhak mengklaim bahwa dirinya paling unggul (Anis, 2005 :50).

Menurut Anis Malik Thoha, wacana pluralisme lahir dari rahim paham "liberalisme". Maka tidaklah aneh jika kemudian gagasan pluralisme agama itu sendiri muncul dan hadir dalam kemasan "pluralisme politik "political liberalism". Jelas, paham "liberalisme" tidak lebih merupakan respon politis terhadap kondisi sosial masyarakat Kristen Eropa yang plural dengan keragaman sekte, kelompok dan mazhab. Namun kondisi pluralistik semacam ini masih senantiasa terbatas dalam masyarakat Kristen Eropa untuk sekian lama, baru kemudian pada abad ke-20 berkembang hingga mencakup komunitas-komunitas lain di dunia.

Dengan demikian menurut Anis Malik Thoha dapat disimpulkan bahwa gagasan pluralisme agama sebenarnya merupakan upaya peletakan landasan teoritis dalam teologi Kristen untuk berinteraksi secara toleran dengan agama lain. Pada dataran ini, gagasan pluralisme agama bisa dilihat sebagai salah satu elemen gerakan reformasi pemikiran atau liberalisasi agama yang dilancarkan oleh Gereja Kristen pada abad kesembilan belas, dalam gerakan yang kemudian dikenal dengan "*Liberal Protestantism*" yang dipelopori Friedrich Schleiermacher (Anis, 2005: 51).

Perlu digarisbawahi di sini, gagasan pluralisme agama sebenarnya bukan hasil dominasi pemikir Barat, namun juga mempunyai akar yang cukup kuat dalam pemikiran agama Timur, khususnya dari India, sebagaimana yang muncul pada gerakan-gerakan pembaruan sosio-religius di wilayah ini. Beberapa peneliti dan sarjana Barat, seperti Parrinder dan Sharpe, justru menganggap bahwa pencetus gagasan pluralisme agama adalah tokoh-tokoh dan pemikir-pemikir yang berbangsa India. Rammohan Ray (1772-1833) pencetus gerakan Brahma Samaj yang semula pemeluk agama Hindu, telah mempelajari konsep keimanan terhadap Tuhan dari sumber-sumber Islam, sehingga ia mencetuskan pemikiran Tuhan Satu dan persamaan antar agama. Sri Ramakrishna (1834-1886), seorang mistis Bengali, setelah mengarungi pengembaraan spiritual antar agama (*passing over*) dari agama Hindu ke Islam, kemudian ke Kristen dan akhirnya kembali ke Hindu lagi, juga menceritakan bahwa perbedaan-perbedaan dalam agama-agama sebenarnya tidaklah berarti, karena perbedaan tersebut sebenarnya hanyamasalah ekspresi. Bahasa Bangal, Urdu dan Inggris pasti akan mempunyai ungkapan yang berbeda-beda dalam mendeskripsikan "air", namun hakikat air adalah air. Maka menurutnya, semua agama mengantarkan manusia ke satu tujuan yang sama, maka mengubah seseorang dari satu agama ke agama yang lain (prosilitisasi) merupakan tindakan yang tidak menjustifikasi, di samping merupakan tindakan yang sia-sia. Gagasan Ramakrishna, persahabatan dan toleransi penuh antar agama, kemudian berkembang dan diterima hingga di luar anak benua India berkat kedua muridnya, Keshab Chandra Sen (1838-1884) dan Swami Vivekananda (1882-1902).

#### **D. Pluralisme dalam Pandangan Agama-Agama**

##### **a. Pluralisme Agama dalam Islam**

Al-Qur'an (Q.S. al-Baqarah [2]: 148), mengakui masyarakat terdiri berbagai macam komunitas yang memiliki orientasi kehidupan sendiri-sendiri. Manusia harus menerima kenyataan keragaman budaya dan agama serta memberikan

toleransi kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya. Oleh karena itu kecurigaan tentang Islam yang anti plural, sangatlah tidak beralasan dari segi idiologis. Bila setiap muslim memahami secara mendalam etika pluralitas yang terdapat dalam al-Qur'an, tidak perlu lagi ada ketegangan, permusuhan, dan konflik baik intern maupun antar agama selama mereka tidak saling memaksakan.

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai kebebasan untuk meyakini agama yang dipilihnya dan beribadat menurut keyakinan tersebut. Dalam al-Qur'an banyak ayat yang berbicara tentang penerimaan petunjuk atau agama Allah. Penerimaan terhadap sebuah keyakinan agama adalah pilihan bebas yang bersifat personal. Barang siapa yang sesat berarti ia menyesatkan dirinya sendiri (QS. al-Isra' [17]: 15). Orang yang mendapat petunjuk yang benar tidak akan ada yang menyesatkannya (QS. al-Zumar [39]: 37) dan orang yang sesat dari jalan yang benar tidak akan ada yang dapat menunjukinya selain Allah (QS. al-Zumar [39]: 9). Selain prinsip tidak ada paksaan dalam agama (QS al-Baqarah [2]: 256), juga dikenal prinsip "*untuk kalian agama kalian, dan untukku agamaku*". (QS al-Kafirun [109]: 6). Sungguhpun demikian, manusia diminta untuk menegakan agama fithrah (QS al-Rum [30]: 30). Fithrah adalah ciptaan dan agama adalah ciptaan Allah. Dua ciptaan dari Maha Pencipta yang sama, yaitu manusia dan agama, tidak mungkin melahirkan kontradiktif. Karena itu, opsi yang terbaik adalah memilih agama ciptaan Allah. Intinya sama sepanjang sejarah, yang dibawa oleh para Nabi/Rasul dan disempurnakan dengan kedatangan Nabi/Rasul terakhir, Muhammad Saw (Rifyal Ka'bah, 2005: 69-70).

Pluralitas adalah merupakan "hukum ilahi dan "sunnah" ilahiyah yang abadi disemua bidang kehidupan, sehingga pluralitas itu sendiri telah menjadi karakteristik utama semua makhluk Allah (lihat: QS Yaasiin [56]: 36, al-Zukhruf [43]: 13, al-Zaariyat [51]: 49; al-Fatir[35]: 27-28), bahkan manusia, macamnya, afaliasinya, dan tingkat prestasi (*performance*) dalam melaksanakan kewajibannya. Allah berfirman dalam surat al-Hujurat [ 47 ] ayat 13 :

*"Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lakilakidan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal."*

Ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan fakta diatas secara jelas menerangkan, pluralisme merupakan realitas yang mewujud dan tidak mungkin dipungkiri. Yaitu suatu hakikat perbedaan dan keragaman yang muncul semata karena memang adanya kehususan dan karakteristik yang diciptakan Allah dalam setiap ciptaan-Nya.

Dari segi kenyataan praktis historis, kita saksikan sejarah masyarakat manusia, dulu maupun kini, penuh berbagai macam peperangan dan konflik berdarah yang sering diwarnai agama, antar kelompok, suku atau bangsa. Kita masih menyaksikan pertikaian-pertikaian agama berdarah di Palestina, Kashmir, India, Filipina dan sebagainya. Belum lagi perang peradaban yang tidak kalah dahsyatnya dengan pertikaian agama, yaitu perang antar peradaban

Islam disatu pihak dengan peradaban Kristen yang didukung sekularisme dipihak lain. Hal ini tentu saja menunjukan secara gamblang adanya perbedaan mendasar antar agama-agama.

#### b. Pluralisme Agama dalam Pandangan Agama Kristen

Jika eksklusivisme dan inklusivisme tidak memadai bagi kekristenan dalam relasi dengan agama-agama lain, maka paradigma pluralisme menjadi pilihan terbaik. Paradigma ini merupakan kritik atas eklesiosentrisme dan kristosentrisme yang muncul dalam eksklusivisme dan inklusivisme. Pluralisme menggunakan pendekatan teosentris yang menekankan pada kehendak universalitas Allah untuk menyelamatkan seluruh manusia. Paradigma pluralisme ini tidak satu sebab dikembangkan banyak orang seperti John Hick, Paul F. Knitter, Gordon D Kaufmann, Wilfred Cantwell Smith, Rosemary Ruether, dan sebagainya (John Hick dan Paul F Knitter, 2001). Di sini penulis mengangkat pluralisme yang digagas oleh Paul F. Knitter.

Pendekatan pluralisme menurut Knitter berangkat dari keprihatinan utama bagaimana kepelbagaian agama dapat berdialog secara jujur dan terbuka sehingga dapat memberikan sumbangsih penting dalam menanggulangi penderitaan manusia dan kerusakan lingkungan yang akut. Tidak pada tempatnya dalam relasi dengan agama-agama lain mengutarakan *bahasa absolutis* seperti: hanya satu-satunya, definitif, superior, absolut, final, tak terlampaui dan total untuk menjelaskan kebenaran yang ditemukan dalam Injil Yesus Kristus. Tanpa mengklaim bahwa semua agama itu *setara* (equal), umat Kristen dengan mentalitas korelasional berpendapat bahwa sejak permulaan semua pihak harus saling mengakui *persamaan hak* di dalam dialog antar-agama sehingga setiap penganut agama berhak berbicara, atau membuat klaim, dan peserta lain membuka hati dan pikiran terhadap kebenaran baru dari partner dialognya.

Di dalam semua agama bagi Knitter terdapat suatu "kesamaan yang kasar" (*rough parity*). Maksudnya, bukan berarti semua agama pada dasarnya memberitakan hal yang sama, tetapi bahwa karena perbedaan mereka dari agama Kristen, agama-agama lain mungkin juga sama efektif dan berhasilnya dalam membawa para penganutnya kepada kebenaran, perdamaian dan kesejahteraan bersama Allah. Dengan kata lain, dengan teologi korelasional umat kristen berpegang pada kemungkinan dan mendorong kemungkinan bahwa Sumber kebenaran dan transformasi yang mereka sebut Allah dalam Yesus Kristus memiliki lebih banyak kebenaran dan bentuk-bentuk transformasi lainnya yang mampu dinyatakan daripada yang telah dinyatakan dalam Yesus. Teologi pluralis atau korelasional tidak hanya mengakui adanya berbagai perbedaan antar-agama yang mencolok bahkan tak terbandingkan, tetapi juga mengakui nilai dan keabsahan dari dunia yang serba berbeda ini. Agama-agama lain bukan hanya sangat berbeda, namun bisa juga sangat bernilai (John dan Knitter, 2001: 42-45).

Secara teologis, umat Kristen mengatakan bahwa mereka percaya kepada suatu Allah yang benar-benar mau menyelamatkan semua orang yaitu Allah dari Yesus Kristus, Allah "kasih yang murni tanpa terikat", yang merangkul semua

dan menghendaki kehidupan dan keselamatan. Allah merangkul semua manusia yang dikasihiNya di dalam dan melalui tidak hanya persekutuan gerejawi, tetapi juga dalam persekutuan dari penganut agama-agama lain. Umat Kristen bisa dan harus mendekati agama-agama lain bukan hanya dengan harapan bahwa mereka  *mungkin (possibly)*  akan menemukan kebenaran dan kebaikan tetapi bahwa mereka  *lebih mungkin (probably)*  menemukannya. Dengan demikian teologi pluralistik mendorong agar umat beragama untuk mengkomunikasikan dan membagikan kandungan yang bernilai dari agama mereka. Agama-agama harus berdialog. Kebenaran setiap agama bukan untuk dirinya sendiri dan mengabaikan yang lain, tetapi untuk dipertemukan sehingga terjadi proses belajar yang memperdalam kebenaran masing-masing. Hakikat agama jelasnya relasional dan dialogis. Jadi semua agama perlu berbicara dan bertindak bersama. Perbedaan dalam masing-masing agama tidak menghalangi hubungan antar sesama di antara mereka (Jhon dan Knitter, 2001: 49).

#### c. Pluralisme Dalam Pandangan Agama Budha

Seperti halnya agama-agama lain, Agama Budha juga dapat ditemukan dengan mudah ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang bersifat universal, yang intinya menganjurkan para pengikutnya untuk selalu menegakkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan umat. Hal ini terbukti bahwa ajaran agama Budha memposisikan ajaran menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan yang disebut “*Hasta Arya Marga*” sebagai sebuah ajaran yang penting dan utama (Yaqin, 2007: 42).

Dengan menerapkan *Hasta Arya Marga* diharapkan manusia dapat melepaskan diri dari *Dukka* (penderitaan hidup) untuk mendapatkan *Nirwana* (kesempurnaan manusia yang bebas dari derita). Ajaran ini disebut “*Majjhimapattipada,*” yaitu suatu prinsip untuk menghindari dua hal yang terlarang dalam agama Budha. Dua hal tersebut adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai kebahagiaan, dan mencari kebahagiaan dengan cara-cara yang merugikan diri sendiri baik dalam bentuk lahir maupun bathin.

#### d. Pluralisme dalam Pandangan Agama Hindu

Gagasan pluralisme agama sebenarnya bukan hasil dominasi pemikir Barat, namun juga mempunyai akar yang cukup kuat dalam pemikiran agama Timur, khususnya dari India, sebagaimana yang muncul pada gerakan-gerakan pembaruan sosioreligius di wilayah ini. Beberapa peneliti dan sarjana Barat, seperti Parrinder dan Sharpe, justru menganggap bahwa pencetus gagasan pluralisme agama adalah tokoh-tokoh dan pemikir-pemikir yang berbangsa India. Rammohan Ray (1772-1833) pencetus gerakan Brahma Samaj yang semula pemeluk agama Hindu, telah mempelajari konsep keimanan terhadap Tuhan dari sumber-sumber Islam, sehingga ia mencetuskan pemikiran Tuhan Satu dan persamaan antar agama. Sri Ramakrishna (1834-1886), seorang mistis Bengali, setelah mengarungi pengembaraan spiritual antar agama (passing over) dari agama Hindu ke Islam, kemudian ke Kristen dan akhirnya kembali ke Hindu lagi, juga menceritakan bahwa perbedaan-perbedaan dalam agama-agama sebenarnya tidaklah berarti, karena perbedaan tersebut sebenarnya hanyamasalah ekspresi. Bahasa Bangal, Urdu dan Inggris pasti akan mempunyai ungkapan

yang berbeda-beda dalam mendeskripsikan “air”, namun hakikat air adalah air. Maka menurutnya, semua agama mengantarkan manusia ke satu tujuan yang sama, maka mengubah seseorang dari satu agama ke agama yang lain (prosilitisasi) merupakan tindakan yang tidak menjustifikasi, di samping merupakan tindakan yang sia-sia. Gagasan Ramakrishna, persahabatan dan toleransi penuh antar agama, kemudian berkembang dan diterima hingga di luar anak benua India berkat kedua muridnya, Keshab Chandra Sen (1838-1884) dan Swami Vivekananda (1882-1902).

Dalam agama Hindu, sebagaimana dalam agama-agama yang lain, ada ajaran yang menekankan pada semua pengikutnya untuk selalu meningkatkan dan menjaga moral dan etika. Dalam agama Hindu ada tiga kata kunci pokok yang selalu ditekankan kepada para pengikutnya untuk selalu diterapkan dalam kehidupan nyata yaitu: “*Rta, Satya dan Dharma*”. Rta yang mengandung pengertian aturan-aturan moral dalam hidup yang harus selalu ditegakkan. Satya yang berarti kebenaran yang harus selalu ditegakkan dalam kehidupan manusia. Dharma adalah ajaran Hindu yang sangat menjunjung tinggi kebenaran.

Selain itu kisah-kisah suci agama Hindu yang ada dalam kitab-kitab suci Tanra dan Purana juga mengisahkan tentang cerita-cerita yang esensinya menjunjung tinggi kebenaran universal. Di dalam kesusastraan Brahmana, dalam kitab Weda, tepatnya dijelaskan dalam Arthavada, menganjurkan manusia untuk melakukan amal perbuatan yang baik (Stuti), dan meninggalkan perbuatan yang jelek (Ninda).

#### **E. Pendidikan Pluralisme Agama di Sekolah**

Dalam Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1, diungkapkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah: “Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara” (UU RI No 20 Tahun 2003) dari defenisi pendidikan tersebut, dengan jelas terungkap bahwa pendidikan Indonesia adalah pendidikan yang usaha sadar dan terencana, untuk mengembangkan potensi individu demi tercapainya kesejahteraan pribadi, masyarakat dan negara. Persoalannya kemudian adalah, apakah yang menjadi pijakan bagi usaha “perencanaan sadar” tersebut?, Serta apa yang menjadi sasaran standar bagi individu, masyarakat dan negara? Pencarian jawaban atas pertanyaan ini sangat penting untuk dicari, sebagai pagangan bagi seluruh insan pendidikan khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Insan pendidikan mulai dari guru, sebagai operator pendidikan, sampai dengan menteri, sebagai pejabat khusus penanggung jawab pendidikan, haruslah mengetahui dengan tepat apa yang menjadi landasan dalam perencanaan pendidikan Indonesia. Pengetahuan mengenai landasan pendidikan Indonesia oleh para guru, akan membuat pelajaran menjadi lebih bermakna. Kebermaknaan ini karena guru di dalam kelas mengetahui untuk apa, mengapa, dan karena apa dia melakukan proses pendidikan di kelas. Demikian juga dengan siswa, akan merasa lebih nyaman untuk belajar, karena

mengetahui alasan dan tujuan ia menginvestasikan waktu mudanya untuk belajar di kelas (<http://ciung16.blogspot.com>).

Pendidikan dan agenda pengembangan budaya menurut Komaruddin Hidayat, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan karena sejatinya salahsatu tujuan yang hendak diraih oleh proses pendidikan adalah menghantarkan anak didik untuk bisa hidup di tengah dan bersama masyarakat guna memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya tempat mereka lahir dan tumbuh. Disayangkan, sebagai lembaga pendidikan, kultur sekolah yang berkembang justru seringkali memisahkan anak didik dari nilai-nilai dan kehidupan nyata yang tumbuh dalam masyarakat sehingga sekolah dan para alumninya semakin teralienasi dari lingkungan sosial budaya yang mestinya mereka cintai dan rawat (Widiastono, 2004: 94).

Pendidikan memiliki peran yang semakin penting dalam masyarakat industri yang kompleks dan selalu mengalami perubahan. Perkembangan pendidikan dalam masyarakat ini selalu sejalan dengan perkembangan kemajuan yang dicapainya. Pendidikan mengacu pada berbagai cara di mana masyarakat menyampaikan pengetahuan – termasuk informasi faktual dan keterampilan kerja serta norma dan nilai – kepada anggotanya (Macionis, 1993: 439). Proses pendidikan tersebut pertama-tama dialami oleh anak dalam lingkungan keluarga, dengan orang tua sebagai pendidik utamanya. Namun dalam masyarakat industri modern, karena keterbatasan kemampuan maupun kesempatan yang dimilikinya, keluarga tidak lagi dapat memenuhi semua kebutuhan proses pendidikan yang diperlukan anak. Oleh karena itu, anak memerlukan lingkungan pendidikan lain yang dapat memfasilitasi proses tersebut, yakni lembaga pendidikan formal atau sekolah (Nashir, 1983: 13). Bahkan proses pendidikan dalam masyarakat ini terpusatkan pada persekolahan (*schooling*), yakni pembelajaran formal di bawah pengarahannya guru yang terlatih secara khusus, karena itu merupakan salah satu lembaga sosial yang utama (Macionis, 1993: 439).

Di zaman modern ini sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang kedua bagi anak setelah lingkungan keluarga. Bahkan sekolah telah menjadi fokus dari pendidikan dalam masyarakat industri. Sekolah telah menjadi lembaga sosial yang sangat penting, yang berfungsi untuk melakukan sosialisasi formal, melalui kegiatan pendidikan, yang berupa transmisi pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang sistematis dan formal (Robertson, 1977: 342).

Di samping itu, sekolah juga merupakan wahana bagi anak untuk mengalami interaksi sosial dengan anggota kelompok yang berlatar belakang sosial yang berbeda-beda, baik teman sebaya maupun orang dewasa (guru dan staf sekolah yang lain). Bahkan interaksi tersebut merupakan proses pendidikan yang utama dalam sistem sekolah (Ballantine, 1993: 230). Interaksi/ hubungan sosial di sekolah tersebut diperoleh anak melalui pengalaman langsung, yang mungkin saja tidak selalu menyenangkan. Karena itu, melalui interaksi tersebut anak belajar menyesuaikan diri dengan kondisi sosial sehingga harus belajar bertenggang rasa dan menghargai prestasi dan perbedaan dengan orang lain (Nawawi, 1993: 199-201). Lebih lanjut, sekolah juga berfungsi untuk melakukan integrasi sosial, yakni menyatukan anak-anak dari berbagai kultur yang beragam dan mengembangkan masyarakat yang memiliki nilai-nilai bersama yang relatif homogen (Robinson, 1986: 351). Hal ini tentunya sangat penting dalam masyarakat yang pluralistik, di mana berbagai budaya yang berbeda, bahkan mungkin

bertentangan satu sama lain, diharapkan dapat hidup secara harmonis dan berdampingan dalam lingkungan yang sama.

Lebih lanjut, karena untuk tujuan pembelajaran di sekolah siswa terikat dalam satu organisasi. Maka sebagai satu kesatuan mereka merupakan satu kelompok, yang memungkinkan mereka berinteraksi dan dapat menumbuhkan kesadaran diri sebagai anggota kelompok (Bany and Johnson, 1975: 60-61). Meskipun kelompok sosial ini diatur dalam struktur yang formal, hubungan antara individu berkembang dalam interaksi dinamis antar anggotanya. Interaksi tersebut terjadi manakala tindakan tindakan masing-masing anggota kelompok mempengaruhi yang lain dalam situasi tersebut (Bany and Johnson, 1975: 79). Dalam hal ini, mereka saling menstimulasi dan merespon sehingga dapat mengembangkan keeratan, struktur, norma, tujuan bersama, atau sebaliknya, mengarah pada konflik atau perpecahan organisasi kelompok. Budaya sekolah dan sistem sosial yang ada di sekolah yang demikian itu dapat mempengaruhi hasil belajar siswa (Richman, 1991: 1), termasuk aspek sosial lain.

Dengan demikian, jelas bahwa sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang dapat memberikan fasilitas bagi perkembangan sosial anak. Karena sekolah memberikan konteks di mana siswa mengalami proses belajar, sekolah dapat dikatakan sebagai lingkungan pendidikan bagi anak yang memberikan iklim sosial bagi perkembangan sosial mereka, yang tidak mungkin dapat dipenuhi di lingkungan keluarga mereka. Sebagai salah satu lingkungan pendidikan, sekolah merupakan sistem sosial yang mengembangkan sikap, nilai-nilai, dan norma yang telah dimiliki anak dalam suatu iklim sosial tertentu (Olive, 1976: 216). Karena lingkungan atau iklim sosial sekolah memiliki pengaruh yang besar terhadap siswa, termasuk dalam mengembangkan sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan norma yang berkaitan dengan hubungan antar kelompok masyarakat, maka bila lingkungan sosial pendidikan (sekolah) yang dimiliki anak berbeda, maka pengaruhnya terhadap perilaku dan nilai-nilai juga akan berbeda (Olive, 1976: 220).

Pengaruh lingkungan pendidikan tersebut juga terjadi pada perkembangan hubungan sosial antar kelompok. Hal ini terjadi karena intensitas interaksi antar individu dalam kelompok (sekolah) mempengaruhi perasaan suka antar mereka. Semakin tinggi intensitas interaksinya, semakin tinggi pula peluang untuk berkembangnya perasaan tersebut. Karena intensitas interaksi antar kelompok yang dimungkinkan terjadi di sekolah-sekolah berbeda, maka 'perasaan' kelompok tersebut juga berbeda dari satu sekolah ke sekolah yang lainnya. Dalam lingkungan pendidikan sekolah yang memungkinkan individu dari berbagai latar belakang budaya dapat berinteraksi secara intensif, rasa suka satu sama lain meningkat. Sedang dalam lingkungan pendidikan sekolah yang tidak memungkinkan terjadinya interaksi antar individu yang berbeda latar belakang budaya, perasaan suka terhadap kelompok lain tidak berkembang.

Dengan kata lain, lingkungan pendidikan di sekolah akan mempengaruhi aspek afeksi (perasaan) hubungan sosial anak dengan individu lain, terutama mereka yang berlatar belakang sosial budaya yang berbeda. Sebagai bagian dari budaya, afeksi tersebut telah tumbuh dan berkembang sebelum anak memasuki lingkungan pendidikan sekolah atau jenjang sebelumnya. Oleh karena itu, sekolah yang memungkinkan interaksi yang intensif dengan anggota kelompok lain akan memberikan pengaruh

positif dalam hubungan dengan kelompok tersebut. Sebaliknya pengaruh positif tersebut tidak dapat diperoleh dalam sekolah yang tidak memungkinkan terjadinya interaksi antar kelompok yang berbeda budaya.

Pendidikan sebagai proses humanisasi menekankan pembentukan makhluk sosial yang mempunyai otonomi moral dan sensitivitas /kedaulatan budaya, yaitu manusia yang bisa mengelola konflik, menghargai kemajemukan, dan permasalahan silang budaya. Toleransi budaya di lembaga pendidikan dapat diupayakan lewat pergaulan di sekolah dan muatan bidang studi, transformasi budaya harus dipandu secara pelan-pelan, bukan merupakan revolusi yang dipaksakan

Sekolah sebagai suatu organisasi mempunyai ciri khas yang terkait dengan anggota atau bagian dari organisasi tersebut, salah satunya adalah keberadaan siswa. Siswa merupakan bagian esensial dari setiap sekolah dan mempunyai ciri khusus dibandingkan dengan unsur yang lain, seperti guru dan karyawan. Secara perorangan siswa melewati waktu lebih singkat dibandingkan dengan guru maupun pegawai administrasi. Oleh karena itu, sebagai suatu organisasi, sekolah terus-menerus dihadapkan pada tugas mensosialisasikan siswa-siswa baru dengan karakteristik yang berbeda-beda. Di sinilah pentingnya menerapkan prinsip struktur terbuka dalam organisasi sekolah. Dengan struktur organisasi yang terbuka memungkinkan sekolah mengantisipasi kemungkinan menyangkut keberadaan siswa (Robinson, 1986).

Pada saat pertama memasuki sekolah, siswa akan bertemu dengan teman sebaya, guru, dan unsur organisasi sekolah lainnya dalam suasana dan lingkungan yang baru. Dengan bersekolah, anak berada dalam suatu lingkungan sosial yang berbeda dan lebih luas daripada lingkungan keluarga. Di sinilah diperlukan adanya proses sosialisasi agar anak dapat menempati dan diterima dalam lingkungan yang baru.

Pluralisme adalah upaya untuk membangun tidak saja kesadaran normatif teologis, tetapi juga kesadaran sosial, di mana kita hidup di tengah masyarakat yang plural dari segi agama, budaya, etnis, dan berbagai keragaman sosial lainnya. Karena itu, pluralisme bukanlah konsep teologis semata, melainkan juga konsep sosiologis. Franz Magnis Suseno memberikan catatan yang patut dikaji oleh masyarakat agama-agama, bahwa tantangan agama-agama di masa mendatang adalah merebaknya konflik, baik antarumat agama maupun interumat agama itu sendiri. Di sinilah arti penting pluralisme sebagai jembatan untuk meminimalisasi dan mengakhiri konflik tersebut. Maka, kita perlu mengubah mindset (kerangka berpikir) yang masih keliru. Menjalin kerukunan antar komunitas beragama dalam Negara yang mempunyai kemajemukan budaya dan agama menjadi kebutuhan yang mendesak (Wasim dkk., 2004: 9).

Kita mesti belajar untuk duduk bersama, saling mendengar dan bertukar pikiran, baik dengan sesama muslim maupun nonmuslim. Upaya untuk mencairkan kebekuan wacana pluralisme juga bisa dipercepat dengan jalan mengintensifkan pendidikan pluralisme dan multikulturalisme di sekolah-sekolah. Lembaga pendidikan adalah media yang paling tepat untuk mereparasi mindset seseorang.

Pendidikan agama yang seharusnya diarahkan menjadi media penyadaran umat, pada kenyataannya sampai saat ini masih memelihara kesan eksklusivitas. Jadi, dengan begitu, dalam masyarakat akan tumbuh pemahaman yang tidak inklusif sehingga harmonisasi agama-agama di tengah kehidupan masyarakat tidak dapat terwujud.

Tertanamnya kesadaran seperti itu niscaya akan menghasilkan corak paradigma beragama yang rigid dan tidak toleran.

Untuk itu, diperlukan adanya upaya-upaya untuk mengubah paradigma pendidikan yang eksklusif menuju paradigma pendidikan agama yang toleran dan inklusif. Model pengajaran agama yang hanya menekankan kebenaran agamanya sendiri mau tidak mau harus 'dibongkar ulang'. Sebab cara pemahaman teologi yang eksklusif dan intoleran pada gilirannya akan dapat merusak harmonisasi agama-agama dan menghilangkan sikap untuk saling menghargai kebenaran dari agama lain (Tilaar, 2005: 117).

Menganggap agama yang satu lebih baik dari agama lain adalah ofensif, berpandangan sempit. Saat ini masih belum banyak dijumpai buku-buku agama mengenai pluralisme. Kita masih miskin dalam hal itu dan mesti belajar banyak dan menulis ulang. Penulisan ulang buku agama dan memasukkannya dalam kurikulum berbasis pluralisme harus sering dilakukan. Untuk selanjutnya, dapat dipakai buku ajar dan menjadi panduan guru-guru.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap agama di dunia selain memiliki nilai-nilai khas (*typical values*) yang hanya terdapat pada masing-masing agama, juga memiliki nilai universal yang bersifat plural. Wacana pluralitas sebenarnya tidak berpretensi menghilangkan nilai-nilai particular dari masing-masing agama. Namun dalam menghadapi pemeluk agama lain yang harus dipegang adalah nilai-nilai universal, berupa keadilan, kesetaraan, berbuat baik terhadap sesama, kejujuran, dan lain sebagainya.

Amin Abdullah, dalam sebuah penelitiannya mengatakan bahwa guru-guru agama di sekolah yang berperan sebagai ujung tombak pendidikan agama dari tingkat yang paling bawah hingga yang paling tinggi nyaris kurang tersentuh oleh gelombang pergumulan pemikiran dan diskursus pemikiran keagamaan di seputar isu pluralisme dan dialog antarumat beragama.

Padahal, guru-guru inilah yang menjadi mediator pertama untuk menerjemahkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme kepada siswa, yang pada tahap selanjutnya juga ikut berperan aktif dalam mentransformasikan kesadaran toleransi secara lebih intensif dan masif. Karena itulah, tidak terlalu mengherankan jika berkecambahnya bentuk-bentuk radikalisme agama yang dipraktikkan sebagian umat menjadi ancaman serius bagi berlangsungnya pendidikan pluralisme yang menekankan pada adanya saling keterbukaan dan dialog.

Saling menghargai dan berkomitmen untuk membangun bangsa yang modern, yang di dalamnya terdapat banyak agama dan etnis. Pluralisme adalah simbol bagi suksesnya kehidupan masyarakat majemuk. Karena itu, kurikulum haruslah dirancang sebaik mungkin untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang arti pentingnya pluralisme dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Saya menyebutnya kurikulum berbasis pluralisme (Mahfud, 2008: 222).

Salah satu persoalan yang sering muncul di kalangan tokoh agama adalah mereka mendambakan terwujudnya agama tunggal di muka bumi ini. Ini adalah suatu kemustahilan dan bertentangan dengan cetak biru Tuhan. Pemahaman seperti itu akan

menjadi penghambat bagi pendidikan berbasis pluralisme. Harold Coward menyatakan bahwa dunia selalu memiliki pluralitas keagamaan.

Untuk menghadapi realitas dunia yang plural ini, umat beragama pun dituntut untuk mampu menempatkan diri dan memahami konteks pluralisme yang dilandasi semangat saling menghormati dan menghargai keberadaan umat beragama lain. Karena itu, ada beberapa pengertian pluralisme yang perlu dipahami oleh masing-masing umat beragama. Pertama, pluralisme tidak semata-mata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan.

Namun, yang dimaksud adalah “keterlibatan aktif” terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Pengertian pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja untuk mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebinekaan. Kedua, pluralisme agama bukanlah sinkretisme, yakni menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut (Tilaar, 2007:190).

Senada dengan Harold Coward, Prof Diana L Eck menekankan, pluralisme bukan hanya beragam atau majemuk, pluralisme lebih dari sekadar majemuk atau beragam dengan ikatan aktif kepada kemajemukan tadi. Pluralisme lebih dari sekadar toleransi dengan usaha yang aktif untuk memahami orang lain. Meskipun toleransi sudah pasti merupakan sebuah langkah ke depan dari ketidaktoleransian, toleransi tidak mengharuskan kita untuk mengetahui segala hal tentang orang lain.

Toleransi dapat menciptakan iklim untuk menahan diri, tetapi tidak untuk memahami. Toleransi saja tidak banyak menjembatani jurang stereotip dan kekhawatiran yang bisa jadi justru mendominasi gambaran bersama mengenai orang lain. Sebuah dasar yang terlalu rapuh untuk sebuah masyarakat yang kompleks secara religius. Sejatinnya pluralisme harus berkembang melebihi toleransi untuk mencapai pemahaman yang konstruktif.

Kita harus memiliki sekolah-sekolah yang giat mengajarkan agama-agama di dunia dalam konteks bidang studi sosial atau sejarah. Kita membutuhkan pemimpin agama yang terlatih yang tidak hanya mampu menanamkan keyakinan yang dalam pada komunitasnya, tapi juga terpelajar secara agama, dan mampu mencegah para agamawan lainnya salah menafsirkan dan mencemarkan komunitas agama lain. Karena itu, pluralisme sebagai desain Tuhan (*design of God*) harus diamalkan berupa sikap dan tindakan yang menjunjung tinggi multikulturalisme.

#### **F. Tanggungjawab Pendidikan dalam Membangun Hubungan Sosial**

Secara sosiologis, pendidikan merupakan bagian dari proses sosialisasi, di mana seseorang belajar tentang nilai, ide-ide, dan harapan-harapan yang membentuk kehidupannya sehari-hari dalam suatu kelompok masyarakat. Tujuan sosialisasi tersebut adalah untuk menggerakkan anak berperilaku sebagaimana anggota kelompok yang lain (Ecksel, 1992:86). Karena itu pendidikan dapat diartikan sebagai proses formal di mana masyarakat menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai dari seseorang atau

kelompok yang lain (Smelser, 1988: 260). Dengan kata lain, ia merupakan proses mengubah dan mengantarkan seseorang agar berperilaku yang sesuai untuk hidup dalam masyarakatnya. Proses sosialisasi ini terkenal dengan dua kategori pengalaman: langsung dan tidak langsung. Pengalaman langsung diperoleh dalam kondisi yang dirancang agar anak bersosialisasi dengan cara tertentu, seperti pembelajaran. Sedangkan pengalaman tidak langsung diperoleh melalui observasi sendiri dan selanjutnya mengatur ekspresi atau perilaku (Irene B. Ecksel, 1992: 89).

Proses pendidikan tentunya tidak terjadi dalam kehampaan dan situasi yang terisolasi. Ia selalu tidak dapat dilepaskan dari keadaan sekeliling, di mana anak berada. Dengan kata lain, proses pendidikan yang dilakukan selalu berada dalam suatu lingkungan. Hal ini sejalan dengan pengertian pendidikan yang dikemukakan oleh Ibrahim Nashir, yang mengatakan bahwa *pendidikan merupakan proses penyesuaian antara seseorang dengan lingkungan di mana ia hidup, .... baik lingkungan alam maupun sosial*. (Nashir, 1983:13). Proses tersebut terjadi sepanjang hidup, tanpa ada batas akhirnya. Dalam pengertian ini, proses pendidikan atau perubahan perilaku seseorang tidak akan pernah terjadi tanpa adanya lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar seseorang yang mempengaruhi dan berinteraksi dengannya (Sarhan, 1978: 24). Pengertian tersebut memberikan petunjuk bahwa lingkungan berfungsi untuk memberikan fasilitas bagi perubahan perilaku anak, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan nilai yang dianutnya. Dengan kata lain, perubahan perilaku anak dalam proses pendidikan merupakan hasil dari adanya interaksi antara anak dengan lingkungannya. Interaksi dengan lingkungan tersebut dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar anak yang sedang mengalami proses pendidikan. Lingkungan tersebut tidak hanya memfasilitasi proses pendidikan. Tetapi juga merupakan bagian dari proses tersebut karena juga berinteraksi dengan anak. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan juga mempengaruhi dan menentukan proses pendidikan yang dialami oleh anak dan konsekuensinya juga akan tercermin dalam hasil proses tersebut.

Lebih lanjut, karena apa yang berada di sekitar anak sangat beragam, maka lingkungan pendidikan juga beragam. Namun demikian, secara garis besar lingkungan pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: alam, sosial, dan kebudayaan (Said, 1988: 31). Meskipun ketiga lingkungan tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan, lingkungan sosial memiliki pengaruh yang terpenting karena interaksinya dengan anak bersifat aktif. Hal ini terjadi terutama dalam kaitannya dengan hubungan antar individu maupun dengan kelompok. Pengaruh lingkungan terhadap seseorang tersebut di antaranya dipengaruhi oleh: lamanya, frekuensi, dan kekuatan lingkungan, jenis, derajat makna, iklim kerjanya, serta sikap kritis orang yang bersangkutan terhadap lingkungannya. Dengan demikian, dengan bervariasinya lingkungan pendidikan, maka bervariasi pula pengaruhnya terhadap seseorang dalam perkembangan hubungannya dengan kelompok lain.

Proses sosialisasi merupakan proses yang senantiasa ada dan dialami oleh manusia. Sosialisasi dilakukan dengan upaya internalisasi nilai-nilai dan penyesuaian serta pengubahan perilaku sejalan dengan respon yang diterima. Yang dimaksud nilai-

nilai dalam hal ini adalah kebudayaan suatu masyarakat tempat proses tersebut berlangsung. Apabila nilai-nilai kebudayaan tersebut sudah terinternalisasi dan terintegrasi dalam diri seseorang, akhirnya akan membentuk struktur kepribadian dasar (*basic personality structure*). Menurut Parson (Said, 1988: 58), struktur kepribadian dasar yang telah diletakkan dalam masa kanak-kanak bersifat relatif statis selama hidup.

Secara sosiologis terdapat tiga perspektif sosialisasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses sosialisasi anak di sekolah; (1) perspektif sosialisasi pasif, (2) perspektif sosialisasi aktif, dan (3) perspektif sosialisasi radikal. Dalam hubungannya dengan upaya menciptakan kondisi yang kondusif pada proses sosialisasi siswa, pihak sekolah, terutama guru, dapat mempertimbangkan tiga perspektif tersebut.

Perspektif sosialisasi pasif mendasarkan diri pada asumsi bahwa anak hanya sekedar member respon kepada rangsangan-rangsangan yang diterima, baik dari guru maupun orang tua. Dalam hal ini ada suatu bentuk pengabaian kemungkinan bahwa siswa akan mengalami beberapa konflik dalam dirinya mengenai perilaku yang layak.

Perspektif sosialisasi aktif berasumsi bahwa anak tidak sekedar memberi respon pada perannya melainkan secara aktif menciptakan perannya dalam kondisi-kondisi tempat ia hidup. Seorang anak sebagai individu-individu menciptakan model sosial mereka, merundingkan makna-makna yang dianut bersama dan mendefinisikan situasi-situasi tempat mereka bertindak.

Selanjutnya, perspektif sosialisasi radikal beranggapan bahwa sosialisasi berlangsung dalam suatu kelompok atau masyarakat yang berlapis-lapis. Dalam arti bahwa latar belakang sosial siswa sangat berpengaruh dalam proses sosialisasi di sekolah. Perspektif ini mengakui bahwa tindakan seorang siswa merupakan bagian dari suatu struktur sosial yang lebih luas.

Pada akhirnya, sekolah diharapkan dapat menjamin jalannya proses sosialisasi anak didik. Proses sosialisasi harus diarahkan pada terbentuknya struktur kepribadian yang timbul dan berkembang menjadi sistem kepribadian yang stabil. Dengan kepribadian yang mantap dan stabil setiap anak didik akan memiliki persiapan dan kesiapan melakukan peran-peran baru di masa yang akan datang.

Faktor terpenting dalam proses sosialisasi adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dengan baik, kepuasan untuk mencapai prestasi pribadi. Hal itulah yang dinamakan *kebutuhan akan prestasi (need of achievement)* sebagaimana yang dikemukakan oleh D.C. McClland. Seseorang yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi lebih tinggi cenderung untuk bekerja lebih keras, belajar lebih cepat, bekerja sebaik mungkin. Selanjutnya, Rosen menjelaskan bahwa orientasi prestasi mempunyai dua dimensi; *pertama*, karakteristik kepribadian terhadap prestasi, yaitu dorongan dari dalam untuk melebihi orang lain. *Kedua*, karakteristik kultural yang menjunjung tinggi nilai prestasi.

Dalam rangka keberhasilan proses sosialisasi dan pembentukan struktur kepribadian yang mantap, tugas utama sekolah adalah membangun kebersamaan dalam suasana keberagaman. Dengan kata lain, yang lebih penting bagi sekolah bukan menjamin adanya kesatuan dengan menegasikan keanekaragaman, tetapi menjaga kebersamaan dalam ke-*bhineka*-an. Pada aspek inilah sikap dan nilai multikulturalisme tampak jelas relevansinya.

Ditinjau dari perspektif yang lebih luas, sekolah harus menjadi tempat tumbuhnya bibit-bibit demokrasi. Sebagaimana yang diungkapkan Azumardi Azra bahwa pemeliharaan tradisi demokrasi tidak diwariskan begitu saja. Pola berpikir, tindakan, dan juga budaya demokrasi adalah sesuatu yang harus disosialisasikan, diajarkan, serta diaktualisasikan kepada generasi muda melalui pendidikan (Azra: 2003). Dengan demikian, sudah menjadi suatu hal yang sangat penting apabila sekolah ikut membentuk pola pikir, perilaku, dan budaya pada anak didik untuk selalu menghargai keberagaman. Lingkungan sekolah harus memungkinkan siswa dapat membiasakan diri berada dalam kebersamaan tanpa mengorbankan kebhinekaan sebagai suatu hal yang bersifat asasi dalam diri manusia.

## G. Penutup

Pembahasan dalam bagian-bagian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang memberikan konteks bagi perkembangan siswa dalam berbagai aspeknya. Dari pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara konseptual lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekolah yang berinteraksi langsung maupun tidak langsung dengan siswa.

Meskipun sekolah sebagai lingkungan terdiri dari berbagai aspek, hubungan sosial antar komponen pendidikan yang ada di sekolah merupakan salah satu aspek yang terpenting bagi perkembangan sosial siswa karena berinteraksi langsung dengan mereka. Dalam konteks etnis, latar belakang etnis komponen pendidikan (siswa dan guru) serta suasana sosial yang ada di lembaga pendidikan dasar bervariasi antara satu sekolah dengan sekolah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adian Husaini " Islam Liberal Paska Fatwa MUI, dalam majalah *Media Dakwah*, Edisi No. 358 Sya'ban 1426 H-September 2005,
- Adian Husaini, majalah *Media Dakwah*, Jakarta : Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2005,Edisi No. 358
- Alef Theria Wasim dkk., *Harmoni Kehidupan Beragama, Problem, Praktek dan Pendidikan*, Yogyakarta: Oasis Publesher, 2004.
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan, 1997
- Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama, Tinjauan Kritis*, Jakarta: Perspektif, 2005.
- Atang Abdul Hakim, dan Jaih Mobarok, *Metodologi Studi Islam*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000, Cet. 3
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Multikultural, Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika*, dalam *Republika*, Rabu 3 September 2003
- Barbara Smey-Richman, *School Climate and Structung for Low Achieving Students* (<http://ericae.net/ericdc/ED340101.htm>, 1991

- Chiril Mahfud, Pendidikan Multikultural, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008
- Dr. Muhammad Longhausen dalam jurnal *al-Hayât al-Thayyibah, al-Ta'addudiyah bayna al-Islâm wa al-Librâliyyah: Hiwâr fî al-Bunyi wa al-Munthaliqâ t*, (Lebanon-Beirut: al-Hayât al-Thayyibah, edisi ke-11, thn. ke-4, 2003/1423
- H.A.R. Tilaar, Manifesto Pendidikan Nasional, Tinjauan Dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural, Jakarta: Kompas, 2005
- H.A.R. Tilaar, Mengindonesia, Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Hadari Nawawi, *Pendidikan dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993
- Ian Robertson, *Sociology* (New York: Worth Publisher, 1977
- Ibrahim Nashir, *Muqaddimah fî al-Tarbiyah: Madkhal ila al\_tarbiyah*, (Amman: Al-Ta'awuniyah, 1983), p. 13.
- Irene B. Ecksel, Schools as Socializing Agents in Childrens's Lives, *Educational and the Family*, ed. Leonard Kaplan, Boston: Allyn And Bacon, 1992.
- Jeanne H. Ballantine, *The Sociology of Education: A Systematic Analysis*, (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1993
- Jhon Hick dan Paul F Knitter, *Mitos Keunikan Agama Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001
- John J. Macionis, *Sociology* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1993), p. 439
- Leo Suryadinata *et.all.*, *Indonesia's Population; Ethnicity and Religion in Changing Political Landscape*, Singapore: ISEAS, 2003
- M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural Cross Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan, Yogyakarta, Pilar Media, 2007
- Muh. Said, *Ilmu Pendidikan*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1988)
- Munir al-Mursy Sarhan, *Fi Ijtima'iyat al-Tarbiyah*, (Kairo: Maktabah al-Anjalu al Mishriyyah, 1978)
- Neil J. Smelser, *Sociology* Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1988.
- Olive Banks, *The Sociology of Education* (New York: Schocken Books, 1976
- Philip Robinson, *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan*, Terj. Hasan Basri (Jakarta: Penerbit Radjawali, 1986)
- Riyal Ka'bah, *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam, Bingkai gagasan yang berserak*, (Ed.) Suruin, Bandung :Penerbit Nuansa, 2005
- Ronald H. Chilcote, *Theories of Comparative Politics, The Search for a Paradigm*, Colorado: Westview Press, 1981.
- Tonni D. Widiastono, Pendidikan Manusia Indonesia, Jakarta, Kompas, 2004